

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legalitas), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.

Menurut Tjokroamidjojo (1995) pembangunan nasional merupakan : (1) Proses pembangunan berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik dan lainnya; (2) Proses perubahan sosial yang merupakan proses perubahan masyarakat dalam berbagai kehidupannya ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih adil; (3) Proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat atau adanya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang paling vital adalah tahap perencanaan dan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Oleh karena itu dalam perencanaan dan penganggaran harus melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Arif (2006) mengatakan partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu pembangunan bisa sukses. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan menghasilkan produk-produk baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Banyak fenomena menarik dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung, terutama berkaitan dengan langkah ke 3 pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 yang berbunyi : Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kabupaten.

Hal menarik tersebut antara lain : mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai musrenbang desa/nagari sampai kabupaten belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan penganggaran pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang merupakan rumusan elite desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten, sehingga partisipasi masyarakat yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo pada tahun 2009 yang melakukan penelitian di Kecamatan Pematang, dimana hasilnya menunjukkan bahwa kualitas proses perencanaan masih rendah. Stakeholder masih belum terwakili secara menyeluruh sehingga pembangunan masih banyak yang belum menyentuh masyarakat. Selain itu selama ini Kabupaten Sijunjung belum pernah melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan, evaluasi hanya dilakukan terhadap kinerja pemerintah setelah akhir tahun. Maka berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas dan mengingat betapa pentingnya proses yang dilalui untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses

perencanaan dan penganggaran serta pentingnya peranan masyarakat, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ *ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN SIJUNJUNG*”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kabupaten Sijunjung.
2. Bagaimanakah efektifitas proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kabupaten Sijunjung.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kabupaten Sijunjung.
2. Menganalisis efektifitas proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kabupaten Sijunjung.

D. Mamfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, sekaligus dapat menjadi acuan untuk perbaikan proses perencanaan dan penganggaran di masa yang akan datang.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan para peneliti yang berminat mengadakan penelitian mengenai perencanaan dan penganggaran partisipatif.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembaca atau peneliti lain yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang perencanaan dan penganggaran partisipatif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sijunjung dengan mendiskripsikan dan menganalisis proses perencanaan dan penganggaran partisipatif melalui kegiatan musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten yang diperoleh dengan pengamatan secara langsung, wawancara mendalam dengan informan secara tidak terstruktur dan serta melihat sinkronisasi usulan masyarakat sampai menjadi APBD dengan membandingkan rekap hasil musrenbang nagari, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan penelitian, diantaranya:

1. Penelitian ini difokuskan pada proses perencanaan dan penganggaran partisipatif di Kabupaten Sijunjung.
2. Analisis proses perencanaan dan penganggaran partisipatif dilihat melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam kegiatan musrenbang tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten.
3. Efektivitas proses perencanaan dan penganggaran partisipatif akan dilihat dari seberapa besarnya usulan-usulan dari masyarakat yang ditampung dalam musrenbang tingkat kabupaten.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan terdiri dari 5 bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut :

- BAB I : Menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian.
- BAB II : Berisi tinjauan pustaka, yaitu mengenai teori, definisi, konsep, pengertian dan arti penting perencanaan dan penganggaran partisipatif.
- BAB III : Membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi : Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Data dan Teknik Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.
- BAB IV : Berisi tentang kondisi umum daerah penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V : Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran